

## **PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM DI KECAMATAN PRINGGABAYA**

**Hakmal Arip**<sup>1</sup>

[ariphakmalarip11@gmail.com](mailto:ariphakmalarip11@gmail.com)

<sup>1</sup> Universitas Mataram

**Nina Karina Karim**<sup>2</sup>

[ninakarim@unram.ac.id](mailto:ninakarim@unram.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Mataram

**Nungki Kartikasari**<sup>3</sup>

[nungkikartikasari@unram.ac.id](mailto:nungkikartikasari@unram.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM di Kecamatan Pringgabaya telah menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan. Peneliti menggunakan purposive sampling dalam mendapatkan sampel penelitian. Dimana informan yang terlibat yaitu pemilik/pengelola UMKM yang terdiri dari 15 informan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Simpulan dari penelitian ini adalah UMKM yang diteliti belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Masing-masing UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran yang terjadi atau bisa dikatakan hanya membuat laporan kegiatan usaha, disajikan sesuai dengan pemahaman masing-masing pemilik UMKM.

**Kata Kunci:** SAK EMKM, UMKM.

### **ABSTRACT**

*Abstract The purpose of this research is to find out whether MSMEs in Pringgabaya District have implemented SAK EMKM in compiling financial reports. This research is a qualitative research with descriptive type. Researchers used purposive sampling to obtain research samples. Where the informants involved were the owners/managers of SMEs consisting of 15 informants. Data collection was carried out using interviews and documentation techniques. The conclusion from this study is that the SMEs that were researched have not implemented SAK EMKM in preparing financial reports. Each UMKM records income and expenses that occur or it can be said that it only makes a report on business activities, presented in accordance with the understanding of each MSME owner.*

**Keywords:** SAK EMKM, UMKM.

## **PENDAHULUAN**

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi di negara kita, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, dan sektor UMKM lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Sektor UMKM mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari krisis ekonomi dan moneter. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan-kan kekompetitifan pasar dan stabilitasi sistem ekonomi yang ada (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018).

Menurut Permatasari (2015) keberadaan UMKM di Indonesia sangat membantu negara dalam membangkitkan ekonomi hal tersebut dapat dilihat pada tahun 1998 hingga tahun 2005, UMKM mampu bertahan dan menjadi roda penggerak utama perekonomian di Indonesia selama terjadinya krisis. Menurut Sularsih & Sobir (2019) UMKM dipandang sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi secara nasional, berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM. Pada tahun 2020 jumlah UMKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 48.091 unit, dengan rincian usaha mikro sebesar 38.999 unit, usaha kecil sebesar 8.296 unit, dan usaha menengah sebesar 796 unit. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan menjadi suatu produk usaha. Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Timur berada pada posisi keempat setelah Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima dengan jumlah UMKM sebesar 4.297 unit. Kecamatan Pringgabaya yang terletak di Lombok Timur memiliki jumlah UMKM yang banyak. Jumlah UMKM di Kecamatan Pringgabaya adalah 182 UMKM yang di dominasi jenis usaha dagang dengan jumlah 149 UMKM (diskop.ntbprov.go.id, 2020). UMKM yang berada di Kecamatan Pringgabaya masih minim penerapan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya kemampuan pencatatan segala aktivitas usaha sesuai dengan SAK EMKM.

Andrianto dkk. (2017) menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional baik dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, sumbangsih terhadap PDB dan bentuk-bentuk lainnya haruslah mendapatkan perhatian lebih untuk mengembangkan dan mempertahankan keberadaan UMKM di Indonesia. Sama halnya dengan sektor-sektor lain yang ada di Indonesia, sektor UMKM juga memiliki persoalan yang biasanya terjadi pada manajemen keuangan yang belum dikelola dengan baik oleh para pelaku UMKM. Sebagai akibat dari belum dikelolanya manajemen keuangan dengan baik, banyak pelaku usaha yang tidak jarang mengalami kerugian.

Permasalahan tentang pengelolaan dana merupakan faktor kunci yang dapat menyebabkan kegagalan pada UMKM. Meskipun banyak faktor lain yang memengaruhi kegagalan dalam UMKM, akan tetapi lazimnya persoalan muncul akibat minimnya pengetahuan dalam mengelola dana. Penyelesaian permasalahan pengelolaan dana pada suatu usaha adalah dengan mempraktikkan akuntansi secara baik, dan benar (Warsono dkk., 2010).

Irman & Azani (2015) mengungkapkan bahwa akuntansi berperan penting dalam kemajuan UMKM, karena dengan pencatatan akuntansi yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan maka dapat membantu usaha kecil dalam pengambilan keputusan yang tepat, mempermudah dalam memperoleh kredit dari kreditur serta dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik UMKM sesuai dengan kondisi keuangan. Standar akuntansi mempunyai perlakuan

akuntansi mulai pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan, dan tentunya dapat menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang andal (Andrianto dkk., 2017).

Penerapan akuntansi menggunakan SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya dengan baik tanpa harus terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan saat ini (IAI, 2016). Masih menurut IAI (2016) SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehan. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan EMKM. Akuntansi yang diperlukan pada UMKM meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan. Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan dapat mengetahui posisi keuangan usaha, memberikan gambaran neraca perusahaan, mempermudah perhitungan pajak usaha yang perlu dilaporkan dan menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha (IAI, 2016). Berdasarkan masalah penelitian yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah UMKM di Kecamatan Pringgabaya telah menerapkan SAK EMKM dalam Menyusun laporan keuangan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Entitas

Teori entitas yang dikemukakan oleh Platon (1962) dalam Santoso (2013) menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian transaksi/kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Teori entitas digagas oleh Wiliam A Platon yang menurutnya dengan adanya teori entitas perusahaan dengan pemiliknya menjadi terpisah. Kepemilikan aset dimiliki oleh perusahaannya, dan antara kewajiban dengan pemegang ekuitas oleh investor dalam aset tersebut merupakan hak yang berbeda (Suwardjono & Wantah, 2010).

Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain bahwa laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan bukan pertanggungjawaban pemilik, maka dari itu pendapatan dan biaya dipandang sebagai perubahan dalam kekayaan perusahaan bukan perubahan dalam kekayaan pemilik. Pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usaha seharusnya menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) mengenai konsep kesatuan usaha (*Economic Entity Concept*) yang menyatakan bahwa seharusnya entitas (dalam hal ini UMKM) harus dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Implikasinya adalah hubungan antara UMKM dan pemilik diperlakukan sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah. Konsep ini penting untuk kelangsungan hidup UMKM sendiri. Pemilik usaha seringkali bingung dalam menentukan keuntungan yang diraih apabila tidak dilakukan pemisahan keuangan. Lebih parah lagi apabila tidak terdapat kejelasan uang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha dengan kegiatan pribadi pemilik usaha (Sari, 2013). Konsep inilah yang dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM.

## **Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terdapat keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan (Agustyas, 2011). SAK yang ada di Indonesia disesuaikan dengan mengikuti standar akuntansi internasional yang sudah baku seperti GAAP, IAS, atau FRS. Tujuannya agar seluruh dokumen atau laporan keuangan di Indonesia juga sudah diakui secara internasional. Sehingga akan membantu pelaku usaha dalam mengarungi pasar global internasional (IAI, 2016).

1. Untuk penyeragaman laporan keuangan  
Penyeragaman ini menjadi hal yang sangat penting mengingat banyak sekali UMKM di Indonesia terutama Provinsi NTB yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga dibutuhkan standar yang dapat diikuti semua pihak yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang seragam dan konsisten.
2. Untuk memudahkan akuntan dalam penyusunan laporan keuangan  
Seorang akuntan memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Sudah sangat jarang zaman sekarang pencatatan sederhana keuangan hanya tentang jumlah pengeluaran dan pemasukan saja yang dilakukan oleh perusahaan. Karena itu, akuntan wajib tahu tentang siklus akuntansi yang baik dan benar hingga suatu pelaporan keuangan perusahaan tepat terwujud dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh banyak pihak.
3. Untuk mempermudah pembaca dan auditor untuk memahami dan membandingkan masing-masing entitas laporan keuangan yang berbeda-beda.

## **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

SAK EMKM merupakan entitas tiada akuntabilitas publik yang signifikan dengan menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan. SAK EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM (IAI, 2016).

Menurut IAI (2016) penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih simpel dan mudah dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk aset dan liabilitas cukup dengan menggunakan biaya historis, (pencatatan dengan menggunakan harga perolehan). Terdapat tiga laporan keuangan dalam SAK EMKM yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang lebih mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan keuangan. Untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) merancang SAK EMKM pada tahun 2016. Namun, SAK EMKM baru dapat digunakan mulai efektif 1 Januari 2018.

## **Penyajian Laporan Keuangan**

Menurut IAI (2016) penyajian laporan keuangan SAK EMKM mensyaratkan entitas menyajikan informasi yang wajar. Penyajian informasi yang wajar untuk mencapai tujuan:

1. Relevan adalah informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan yang relevan dan jika dia dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasinya di masa lalu.
2. Representasi tepat adalah informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi memiliki kualitas dengan menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar.

3. Perbandingan adalah informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan entitas. Dengan adanya perbandingan laporan keuangan, dapat mengevaluasi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
4. Keterpahaman adalah informasi yang diberikan dapat dimengerti bagi pemakai. Pemakai dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup serta keinginan untuk mendalami informasi.

### **Tujuan Laporan Keuangan**

IAI (2016) mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, yang dapat berguna bagi beberapa pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan pemakai laporan keuangan sebagai sumber ekonomi usaha. Adapun pemakai laporan keuangan seperti kreditor, dan investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Lubis (2017) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk sejumlah pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban yang dilakukan manajemen atas sumber daya yang telah diberikan kepercayaan untuknya.

### **Indikator Penerapan SAK EMKM**

IAI (2016) menyatakan bahwa indikator dalam penerapan SAK EMKM melakukan pencatatan keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh IAI terdiri atas 3 macam yaitu:

#### 1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam pengembangan usaha laporan keuangan menjadi acuan untuk membuat perencanaan usaha di masa depan, salah satu dengan melihat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan keuangan (IAI, 2016).

#### 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah gambaran dari prestasi usaha suatu periode. Menurut IAI (2016) bagian dari kinerja usaha pada laporan laba rugi yaitu:

- a. Penghasilan (*income*) merupakan meningkatnya kegunaan ekonomi yang berupa peningkatan aset, arus kas masuk atau menurunnya kewajiban yang menyebabkan naiknya ekuitas yang tidak berasal dari permodalan selama waktu pelaporan.
- b. Beban (*expenses*) merupakan berkurangnya manfaat ekonomi yang berupa pengurangan terhadap pengguna aset, arus kas keluar atau meningkatnya kewajiban yang menyebabkan pengurangan ekuitas yang disebabkan oleh penanaman modal selama periode pelaporan seperti beban keuangan dan beban pajak.

#### 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Berdasarkan IAI (2016) catatan atas laporan keuangan memuat tentang:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

## **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dimaksud adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (pasal 1(1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (1(2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (1(3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008).

## **Penerapan SAK EMKM pada UMKM**

SAK EMKM merupakan pedoman dalam penyusunan akuntansi secara sederhana oleh para pengelola mikro kecil dan menengah. Penerapan tersebut ditunjukkan agar para pengelola mikro kecil dan menengah dapat memberikan suatu bentuk laporan keuangan dalam rangka menyusun serta mengimplementasikan program-program yang dapat membantu agar terciptanya pertumbuhan usaha yang lebih tinggi. *System* penyusunan SAK EMKM ditunjukkan agar mempermudah pengelola mikro kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan secara sederhana dalam laporannya terdapat tiga laporan yang harus dipenuhi yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016)

Penerapan SAK EMKM dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dasar seperti dalam laporan laba rugi dengan menggunakan selisih antara pendapatan dan biaya. Catatan atas laporan keuangan dibuat berdasarkan kegiatan operasional sehingga dapat semua unsur informasi yang tidak terkandung dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi (Ayudhi, 2020).

## **Penelitian Terdahulu**

1. Hasanah & Sukiyarningsih (2021) meneliti mengenai penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM rempeyek bayam Kecamatan Cikeusal.
2. Nuvitasari dkk. (2020) meneliti mengenai implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah pada UD. Karya Tangi Banyuwangi.
3. Kartika & Puspaningrum (2020) meneliti tentang tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam implementasi SAK EMKM.
4. Ayudhi (2020) meneliti tentang analisis penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus UMKM Farhan Cake's).
5. Ayudhi (2020) meneliti mengenai analisis penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM di Kota Batam. (Hasanah, A & Sukiyarningsih, 2021)

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

### **Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara, karena terjun langsung meneliti pemilik UMKM untuk dimintai informasi terkait pencatatan, pengakuan dan pengukuran dalam penyajian usahanya.

### **Informan dan Kehadiran Peneliti**

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pringgabaya sebanyak 149 populasi dengan jenis usaha dagang. Salah satu metode *purposive sampling* dengan kriteria yang melakukan pencatatan transaksi keuangan. Jadi informan yang memenuhi kriteria untuk diteliti sebanyak 15.

### **Setting Lokasi (Situs Penelitian)**

Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di Kecamatan Pringgabaya.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Wawancara dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dalam SAK EMKM yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut para informan mereka belum mengetahui bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang mereka ketahui bahwa laporan keuangan hanya satu jenis yang biasa mereka sebut dengan pembukuan. Bentuk laporan yang dibuat oleh para pelaku usaha contohnya adalah laporan pendapatan dan pengeluaran. Sehingga para pelaku UMKM akan kebingungan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat karena para pelaku UMKM tidak mengetahui kondisi keuangannya.

Para pelaku usaha hanya melakukan pencatatan sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing usaha yang dijalankan. Pencatatan yang dilakukan merupakan pencatatan sederhana yang bersumber dari bukti transaksi. Pencatatan yang disajikan yaitu hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran. Pelaku UMKM belum mencatat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, mereka mencatat secara sederhana sesuai dengan cara mereka masing-masing untuk mengatur keuangan usahanya. Jadi bisa diketahui bahwa pencatatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM tidak sesuai dengan SAK EMKM akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan SAK EMKM tidak ada dalam pencatatan yang dilakukan oleh UMKM.

Dalam pengakuan dan pengukuran laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan dan diukur sebesar biaya perolehan. Tetapi semua UMKM yang diteliti tidak mengakui aset dan liabilitas keuangan

dalam pencatatan yang dilakukan. Aset tetap yang dimiliki oleh para pelaku UMKM tidak dicatat dalam laporan pembukuan yang mereka buat. Nilai aset tetap hanya di perkirakan saja tanpa menghitung biaya penyusutan dari masing masing aset tetap yang dimiliki. Pengukuran untuk akun hutang yang dilakukan oleh kelima belas UMKM untuk menetapkan nominalnya diukur berdasarkan jumlah kas yang masuk. Dalam hal itu, pencatatan yang dilakukan oleh pelaku usaha diukur berdasarkan historis sebesar harga perolehan saat transaksi dilakukan. Jadi dapat diketahui bahwa UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Laporan usaha yang disajikan oleh para pelaku UMKM hanya berupa pencatatan tentang penjualan/pemasukan dan pengeluaran yang berlangsung. Laporan penjualan/pemasukan berisikan nama barang/produk yang laku, disertai jumlah dan harga jual. Begitu pula laporan pengeluaran hanya dicatat nama barang/produk yang dibeli dan laporan yang disajikan oleh para pelaku UMKM dalam upaya pengawasan atau pengendalian manajemen usaha hanyalah sebatas laporan usaha yang dibuat atas dasar pemahaman pribadi yang dirasa mudah untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. 15 UMKM yang diteliti hanya menyajikan laporan keuangan secara manual dengan format nama barang/keterangan, jumlah, serta nominal harga barang. UMKM tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM karena dari nota penjualan dan pembelian, kas masuk dan kas keluar sudah dapat diketahui apakah usaha yang dijalani menghasilkan laba atau rugi.

Menurut informan penelitian ini cara mereka dalam mengetahui laba rugi dalam usaha cukup mudah. Jika hasil penjualan yang diterima lebih banyak dari pengeluaran maka dikatakan laba, begitu pula sebaliknya jika pengeluaran lebih banyak dari hasil penerimaan usaha maka itu rugi. Menurut informan lain dalam penelitian ini menyebut bahwa mereka bisa dikatakan untung jika mendapat penjualan dalam jumlah besar atau lebih banyak dari sebelumnya, dan mereka dikatakan rugi apabila terdapat banyak retur dari penjualan biasanya.

Namun yang menjadi masalah adalah ketika pemilik usaha menggunakan barang dagangannya untuk keperluan pribadi. Para pemilik usaha tetap mencatat dan mengurangi stock barang tanpa menerima pembayaran. Selain itu sering kali pembayaran uang dari konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dampak dari hal ini adalah pemilik tidak pernah mengetahui keuntungan sesungguhnya yang didapatkan. Dalam hal ini para pemilik/pengelola tidak menerapkan konsep entitas di mana entitas harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas, karena seharusnya terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan usaha yang dijalani.

Mengetahui laba rugi dalam usaha sangatlah penting, agar mengetahui bagaimana posisi usaha saat ini. Apakah mengalami keuntungan atau sebaliknya mengalami penurunan dan kerugian. Dan salah satu cara melihat laba atau rugi yang dialami usaha dengan melihat laporan laba rugi. Namun untuk para pelaku usaha memiliki pandangan tersendiri dalam mengetahui usahanya mengalami keuntungan atau kerugian. Ada yang melihat dari penjualan, ada pula yang melihat dari jumlah produksi yang dikembalikan. Persepsi pelaku UMKM yang terpenting mereka untung/rugi dalam usaha yang dijalankan. Konsep laba rugi yang dipahami oleh para pemilik/pelaku usaha tidak sesuai dengan SAK EMKM. Di mana menurut SAK EMKM, laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun pendapatan, beban bunga dan beban pajak. Hal ini menyebabkan besar perhitungan atau persepsi keuntungan/kerugian yang dialami masing-masing usaha kurang tepat.

Dari hasil wawancara ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi dalam menjalankan usaha. Selama ini pemahaman bentuk pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pemilik usaha. Jadi, pengetahuan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap bentuk penyusunan pencatatan keuangan yang diterapkan oleh para pelaku UMKM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Pringgabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 UMKM yang diteliti belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Masing-masing UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran yang terjadi atau bisa dikatakan hanya membuat laporan kegiatan usaha, disajikan sesuai dengan pemahaman pemilik UMKM tersebut yang mereka anggap sebagai laporan keuangan. Padahal laporan tersebut masih sangat jauh dari standar akuntansi keuangan. Laporan yang mereka buat digunakan untuk mengatur keuangan, seperti dalam mengetahui laba/rugi yang dihasilkan oleh masing-masing UMKM. Penerapan SAK EMKM yang benar belum dilaksanakan oleh 15 UMKM yang diteliti, sampai diterbitkannya laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang lengkap berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan belum ada ditemukan dalam laporan yang disusun oleh masing-masing pemilik UMKM yang saya teliti. Dengan demikian 15 UMKM tersebut belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Sehingga para pelaku UMKM akan kebingungan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat karena para pelaku UMKM tidak mengetahui kondisi keuangannya.

## REFERENSI

- Agustyas, D. (2011). *“Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cermin Ekonomi Daerah”*,. <https://dhiasitsme.wordpress.com/2013/06/30/>
- Andrianto, Maharani, R., & Nuraini, F. (2017). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Peternakan Ayam Petelur ( Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Sugio Lamongan ). *Majalah Ekonomi* \_, 22(1411), 1–7.
- Ayudhi, L. F. R. S. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Umkm di Kota Padang. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i1.17>
- Cirebon [Institut Agama Islam Negeri (Iain)]. In *Nurul Utami Permatasari* (Vol. 151). <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- diskop.ntbprov.go.id. (2020). *Data UMKM NTB*. <https://data.ntbprov.go.id/group/dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah>
- Hasanah, A, N. dan, & Sukiyarningsih, T. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Rempyek Bayam Kecamatan Cikeusal. *Jurnal Ekonomi Vokasi*, 4(2), 12–26.
- Indonesia, (IAI) Ikatan Akuntansi. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, 4, 1–54.

[http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft\\_ed\\_sak\\_emkm\\_kompilasi.pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf)

Irman, M., & Azani, V. (n.d.). Perancangan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Toko Etek Jas (Studi Kasus Bukit Tinggi). *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 78, 104–120.

Kementerian Koperasi dan UMKM. (2018). *Data UMKM*. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>

Lubis, R. H. (2017). *Pengantar Akuntansi Jasa*. Gava Media.

Permatasari, N. U. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Ukm Di Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota

Santoso, I. (2013). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*.

Refika Aditama.

Sari, D. P. (2013). Telisik Perlakuan Teori Entitas dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7192>

Sularsih & Sobir (2019). *Penerapan Akuntansi Sak Emkm Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. 4, 10–16.

Suwardjono, & Wantah, I. G. (2010). *Teori Akuntansi perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE Yogyakarta.

Warsono, S., Endra Murti Sagoro, A., Arif Darmawan, M., & Arsyadi Ridha, S. M. (2010). *UMKM Ternyata Mudah*. 1–144.